

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Janie, D. N. (2012). Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS. Semarang: Semarang University Press.
- Atkinson, A. A., Kaplan, R. S., Matsumura, E. M., & Young, S. M. (2007). *Management accounting*. Pearson Education.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Salemba Empat.
- Basuki, Sulisty. (2015). Metode Penelitian. Jakarta : Wedatama Widya Sastra
- BPK RI, (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). (2021). *Pedoman pengawasan internal pemerintah* (Edisi terbaru). Jakarta: BPKP.
- Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. (2008). Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud. *Accounting and Finance*, 48(4), 543-559.
- Campbell, J. D., Jardine, A. K. S., & McGlynn, J. (2016). *Asset management excellence: Optimizing equipment life-cycle decisions* (2nd ed.). CRC Press.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah.2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung : Fokusmedia
- Christina, Ellen, Dkk., (2011), Anggaran Perusahaan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Darise, N. (2020). *Pengelolaan keuangan daerah: Akuntansi, perencanaan anggaran, dan akuntabilitas keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Duli, N. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi/Tesis & Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Doli D Siregar. (2019). Manajemen aset" Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 15(2), 9–25.
- Fauzi, M. (2023). Analisis pengaruh PAD dan belanja daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 112-125.

- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Grubisic, M., Nestic, S., & Štimac, H. (2009). Public asset management: Challenges and opportunities. *Journal of Public Finance and Management*, 10(3), 345–360.
- Hammond, R. (2013). Preventive maintenance and its role in public service efficiency. *Public Management Review*, 15(5), 671–688. <https://doi.org/10.xxxx>
- Halim, A. (2019). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hunter, J. S. (1977). *Federalism and fiscal balance: a comparative study*. Canberra: Australian Nasional University Press for Research on Federal Fiscal.
- Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Indonesia. (2022). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kuningan, B. K. (2023, Februari 23). Artikel. Mengenal APBD Lebih Dekat Pendapatan Asli Daerah. Diakses dari <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-apbd-lebihdekata-pendapatan-daerah>
- Machali, I. (2015). *Statistik Itu Mudah: Menggunakan SPSS Sebagai Alat Bantu Statistik*. Yogyakarta: Ladang Kata
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Mulyadi, Pemeriksaan dalam Pengawasan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), hal 163.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Rudianto, 2009, "Penganggaran", Erlangga, Jakarta.
- Rinaldi, I. N. (2021). Analisis pengaruh belanja modal dan Tingkat Investasiterhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Samsudin, I. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah: Studi kasus di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 23-37.
- Sari, D. P., & Nursidik. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Investasiterhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 55-68.
- Siti, N. H., & Sudirman, D. (2020). Pengelolaan aset daerah dan tantangan dalam akuntabilitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(3), 80-90.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, R., & Wibowo, D. S. (2015). Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 193-210.
- Susilowati, I. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 11(2), 83-95.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wildavsky, A. (1974). *The Politics of the Budgetary Process*. Little, Brown
- World Bank. (2021). *Public asset management: Strengthening governance and accountability*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- Yusuf, A., & Pradana, E. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Investasiterhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 16(1), 1-15.